

DAFTAR PUSTAKA

- D.f. Scheltens, didalam Nelman Kusuma, Karya Tulis Ilmia, Sosialisasi isu-isu HAM kontenpoer, Konsolidasi Konsep HAM Berbasis Pembangunan, di sampaikan pada Binteks Perda Kabupaten Halmahera Barat, 2008.
- F.M. Schelten, didalam Aswanto, 1998, , *Folofosi Hak Asasi Manusia Serta Penegakannya Dalam Perspektif Negara Hukum*,
- Iskandar Saharudin dan Lukman Hakim, 2011, *Bantuan Operasional Sekolah, Konsistensi Mandat, Keberlanjutan, dan Akuntabilitas*, Jakarta, PATTIRO, Cetakan I,
- Jack Donelly, 1990, dalam De Rover, C, 1998, *To Serve and to Protect: Human Rights and Hunmanitarian Law for Police and Security Forces*, International Committee of The Red Cross, Geneve
- Julianti Pontoh, Ventje Ilat, Hendrik Manossoh, Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kota Kotamobagu, Jurnal,
- Kemendiknas, 2014, Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015, Dekdikbud , Jakarta,
- Muhammad Alisar Lubis, 2017, Skripsi, Analisis pengelolaan dana bos di ma darul hadits hutabaringin kec. Siabu kab. Mandailing natal, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Marthen Kriale, didalam Browline, Ian dan dikutip oleh Aswanto, 1998, *Folofosi Hak Asasi Manusia Serta Penegakannya Dalam Perspektif Negara Hukum*
- Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana,
- Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan,..diakses pada <http://www.gogel.com>. BAB II Manajemen Pembiayaan Dan Bos Dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran*
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media, 2010, <http://www.gogel.com>

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Titik Triwulan Tutik, 2015. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Bandung

Winingsih, *Pengaruh Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Kualitas Pendidikan Di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan*, e-JKPP Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik, Vol.2No .2 Agustus 2016, ISSN:2443-1214.

Undang-Undang Dasar Negara Keatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan,

Pasal 26 DUHAM, Lihat pula: Pasal 18 (4) Kovenan Sipol. Pasal 7 Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Surat Edaran Nomor : 903 / 1043 / SJ tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Juknis Bos Reguler Tahun 2019 (SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, SLB), Sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah, www.jdih.kemendikbud.go.id.

Sumber: <http://arwanarsyad.blogspot.com/2011/06/atribusi-kewenangan-delegasi-dan-mandat.html> diakses 29 Mei 2019.

<http://www.babii.pembiayaan-pendidikan->, dikases Pada Tanggal 10 September 2018

<http://www.gogel.com-bab-ii,landasan,landasan,teori,PDF,pengertian,bos.> diAkses Pada Tanggal 17 September 2018

<http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2015/12/6-kewenangan-bidang-pendidikan-ini.html?m=1> diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

<https://Ainamulyana.blngspot.com/2017/03/permendikbud-nomor-8-tahun2017-tentang.html?m=1> diakses pada tanggal 19 Juli tahun 2019

[hukum.onlain.Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang Nomor 11/Pid/TPK/2013/PT.TK.](http://hukum.onlain.Putusan.Pengadilan.Tinggi.Tindak.Pidana.Korupsi.Tanjungkarang.Nomor.11/Pid/TPK/2013/PT.TK)

BPS Provinsi Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2018, ISSN: 2356-0592 No. Publikasi : 82560.1808, Katalog/*Catalog*: 1102001.82

BPS Maluku Utara Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010, ISN No. Publikasi:82.000.1002, Katalog BPS : 1102001.82